

## **Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa tanete Harapan Kecamatan Cina Kabupaten Bone**

**Nurtasya<sup>1\*</sup>, Muhammad Fakhri Amir<sup>2</sup>, Hartas Hasbi<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Institut Agama Islam Negeri Bone

\*Corresponding Author e-mail: [nurtasyaarsyad2002@gmail.com](mailto:nurtasyaarsyad2002@gmail.com)

**Abstract:** *This thesis is entitled Analysis of the Implementation of Good Corporate Governance on the Quality of Financial Reports in Tanete Harapan Village, Cina District, Bone Regency. This study aims to analyze the extent to which the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) Principles influences the Quality of Financial Reports in the Tanete Harapan Village Government, Cina District, Bone Regency. This study uses a qualitative approach with a case study method. Data were collected through in-depth interviews with village officials, direct observation of the financial report preparation process, and a review of applicable documents and regulations. The results of the study indicate that the implementation of GCG in Tanete Harapan Village has been implemented. In general, the principle of transparency has begun to be applied through the delivery of financial information to the public, although it is not yet fully accessible and understandable by villagers. The quality of the resulting financial reports is directly influenced by the successful implementation of the GCG Principles. Village financial reports show improvements in terms of timeliness and compliance with standard reporting formats. This study concludes that increasing the implementation of comprehensive GCG Principles will have a significant impact on improving the quality of village government financial reports. Therefore, concrete steps are needed in the form of increasing the capacity of village officials through training and technical assistance, strengthening the internal monitoring system, and increasing community participation in the village financial management process.*

**Keywords:** *Good Corporate Governance, financial reports, Tanete Harapan village government, quality of village financial reports*

**Abstrack:** Skripsi ini berjudul Analisis Penerapan *Good Corvorate Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa Tanete Harapan Kecamatan Cina Kabupaten Bone. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana Penerapan Prinsi-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Desa Tanete Harapan, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan aparat desa, observasi langsung terhadap proses penyusunan laporan keuangan serta telaah dokumen dan regulasi yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan GCG di Desa Tanete Harapan sudah di terapkan. Secara umum, prinsip transparansi mulai diterapkan melalui penyampaian informasi keuangan kepada masyarakat, meskipun belum sepenuhnya mudah diakses dan dipahami oleh warga desa. Kualitas laporan keuangan yang dihasilkan dipengaruhi langsung oleh keberhasilan penerapan Prinsip-prinsip GCG tersebut. Laporan keuangan desa menunjukkan peningkatan dalam hal ketepatan waktu dan kepatuhan terhadap format pelaporan standar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan penerapan Prinsip-prinsip GCG menyeluruh akan berdampak signifikan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Oleh karena itu, diperlukan Langkah-langkah konkret berupa peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan dan pendamping teknis, penguatan system pengawasan internal, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan desa.

**Kata Kunci :** *Good Corporate Governance, laporan keuangan, pemerintah desa tanete harapan, kualitas laporan keuangan desa*

### **Pendahuluan**

Pemerintah merupakan sebuah badan atau lembaga yang diberikan wewenang untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi jalannya pemerintahan di suatu negara atau wilayah tertentu. Pemerintah bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, termasuk pembuatan kebijakan, pelaksanaan hukum, serta penyelenggaraan pelayanan publik demi terciptanya ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memenuhi kebutuhan warga, dan memastikan bahwa setiap lembaga pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif.



Meskipun demikian, pada kenyataannya terdapat banyak kasus yang merugikan masyarakat dan tidak sejalan dengan kepentingan negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Salah satu contoh tindakan pemerintah yang merugikan masyarakat adalah praktik kecurangan atau *fraud*.( Nova Karisma, 2024).

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*) adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG). Hal ini juga sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pemerintah menekankan pentingnya percepatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dengan demikian, penerapan GCG di lingkungan pemerintahan dan sektor akuntansi menjadi bagian penting dalam mendukung tercapainya tujuan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dalam perkembangan menuju sistem pemerintahan yang lebih demokratis, muncul kebijakan yang dikenal dengan istilah *Good Corporate Governance* atau pemerintahan yang baik. *Good Corporate Governance* merupakan suatu model manajemen pembangunan yang menekankan pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, partisipatif, dan berkeadilan .( Armereo, 2021)

*Good Corporate Governance* (GCG) ialah sistem pengelolaan yang baik, yang muncul dari keinginan untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien, dan menghasilkan kinerja yang optimal. Hal ini dilakukan dengan memastikan bahwa setiap sektor melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat. Saat ini, GCG telah berkembang menjadi suatu keharusan bagi pemerintah untuk menyampaikan kepada masyarakat apa saja langkah yang telah diambil guna memastikan bahwa proses tata kelola yang dijalankan sesuai dengan ketentuan, prosedur yang tepat, serta hukum yang berlaku.

Selain meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, penerapan *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan dana desa juga bertujuan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat desa. Tata kelola yang dilakukan secara tepat, transparan, dan akuntabel menjadi indikator bahwa aparatur desa telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan optimal. Penerapan prinsip GCG juga berperan dalam meminimalkan tindakan penyimpangan yang bisa merugikan banyak pihak, termasuk masyarakat, aparatur desa, hingga negara. Di samping itu, GCG juga berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja aparatur desa, guna menilai apakah pengelolaan dana desa telah dilaksanakan sesuai dengan amanah dari pemerintah pusat dan harapan masyarakat, terlebih di tengah maraknya informasi mengenai berbagai bentuk penyimpangan. Dalam prosedur pelaksanaan pengelolaan dana desa, perencanaan yang baik merupakan hal yang sangat diperlukan. Tujuan dari perencanaan ini adalah agar pelaksanaan pengelolaan dana desa dapat berjalan secara terarah, maksimal, dan sesuai dengan keinginan pemerintah desa serta seluruh masyarakat, bukan hanya sebagian kelompok saja.( Fitriani Rahma,2022)

Laporan keuangan yang berkualitas harus mampu menunjukkan sejauh mana laporan tersebut menyediakan informasi yang jujur dan adil mengenai posisi keuangan yang menjadi dasar dalam menilai kinerja suatu perusahaan. Kualitas laporan keuangan tercermin dari kemampuannya dalam merepresentasikan karakteristik kualitatif sebagaimana telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam kerangka dasar penyusunan laporan keuangan. Selain itu, kualitas laporan keuangan desa juga sangat penting dalam mendukung terciptanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di tingkat desa. Laporan keuangan yang berkualitas harus mencakup informasi yang lengkap, relevan, dapat dipahami, dan dapat diandalkan. Hal ini memungkinkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengevaluasi kinerja pemerintah desa dalam mengelola keuangan secara efektif, serta memberikan umpan balik yang konstruktif. Pengelolaan keuangan yang

baik melalui laporan keuangan yang berkualitas juga membantu meminimalisir potensi penyalahgunaan dana, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.

Desa Tanete Harapan, yang terletak di Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan sebagai salah satu desa yang memperoleh alokasi dana desa yang signifikan, menjadi contoh yang relevan untuk menilai bagaimana penerapan GCG diterapkan dalam pengelolaan keuangan. Dengan sumber daya keuangan yang lebih besar, tantangan dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas juga semakin meningkat. Oleh karena itu, evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan akuntansi desa sangat penting untuk mengetahui apakah yang diterapkan sudah mampu mendukung pengelolaan keuangan yang efisien dan bertanggung jawab.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dipilih untuk menggali dan menganalisis secara mendalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam kaitannya dengan kualitas laporan keuangan di Desa Tanete Harapan, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dan objek penelitian yaitu Desa Tanete Harapan, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone.

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Bone, tepatnya di Desa Tanete Harapan, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Desa Tanete Harapan merupakan tempat yang tepat untuk dijadikan lokasi penelitian karena tersedianya data-data tertulis yang cukup lengkap dan relevan.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **1. Laporan Keuangan Pemerintah Desa Tanete Harapan**

#### **a. Pengelolaan Dana Desa**

Pengelolaan Dana Desa mencakup tiga tahapan utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Secara umum, proses ini harus dilaksanakan dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan keuangan Dana Desa merupakan bagian integral dari pengelolaan keuangan desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, perencanaan yang jelas, dan pengendalian yang terukur.
- 2) Setiap kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan semua unsur masyarakat desa. Selain itu, proses ini bertujuan untuk memaksimalkan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan serta berbagai komponen masyarakat lainnya.
- 3) Setiap kegiatan yang didanai Dana Desa harus dapat dipertanggungjawabkan dari aspek administratif, teknis, maupun hukum. Selain itu, kegiatan tersebut harus dirancang agar berkelanjutan, dengan menjamin adanya pemeliharaan yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Sesuai ketentuan yang berlaku, pengelolaan dana desa wajib dilaksanakan secara terbuka dan transparan melalui forum musyawarah desa, dimana hasil kesepakatannya dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes).

#### **b. Tahap Perencanaan Dana Desa**

Langkah awal dalam proses perencanaan di tingkat desa dimulai dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). Dokumen ini disusun pada awal masa jabatan kepala desa yang baru terpilih. RPJMDesa

berfungsi sebagai pedoman perencanaan pembangunan desa yang mencakup arah kebijakan pembangunan, strategi pembangunan, serta program kerja desa. Perencanaan ini berlaku untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun, yang biasanya sesuai dengan masa satu periode kepemimpinan kepala desa. Dengan adanya

RPJMDesa, desa memiliki panduan yang jelas dalam melaksanakan pembangunan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Setiap tahunnya, perencanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Tanete Harapan diawali melalui rapat di tingkat RT. Rapat ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap 40 hari sekali. Dalam pelaksanaannya, perangkat desa secara bergiliran menghadiri rapat di tiap-tiap RT untuk berdialog langsung dengan warga serta menampung berbagai usulan program yang akan direncanakan dan dijalankan selama satu tahun ke depan. Dengan adanya komponen ini maka di dapatkan pertanyaan yang diberikan kepada responden:

1) Prosedur Perencanaan Dana Desa, Irwanto (Kepala Desa) mengatakan:

*“Seluruh usulan yang disampaikan mengenai perencanaan dana desa akan ditampung terlebih dahulu, namun tidak semuanya dapat disetujui. Usulan-usulan tersebut akan dibahas secara bersama, lalu dipilih dan ditentukan mana saja yang akan disepakati untuk direalisasikan”.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Tanete Harapan, Warga diberikan kebebasan untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah desa. Selanjutnya, seluruh usulan yang terkumpul akan dibahas lebih lanjut dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Tanete Harapan dihadiri oleh Kepala Dusun, Ketua RW, anggota BPD, serta tokoh masyarakat. Kegiatan ini diselenggarakan di Balai Desa dan bertujuan untuk menentukan skala prioritas serta menetapkan program kerja utama berdasarkan usulan yang disampaikan oleh warga.

Usulan-usulan yang diperoleh dari forum Musrenbangdes disampaikan kepada Tim Penyusun RPJMDes dan RKP Desa untuk dimuat dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Dokumen ini menjadi acuan utama dalam perencanaan pembangunan tahunan desa, yang mencakup seluruh rencana kegiatan pembangunan yang akan direalisasikan dalam kurun waktu satu tahun. Sementara itu, usulan yang bersifat jangka menengah akan dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), yang berlaku selama enam tahun. Seluruh rencana dalam RKPDDes kemudian menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes).

2) Proses Perencanaan Dana Desa, Irmasanti, S.Pd. (Sekertaris Desa Tanete Harapan) mengatakan:

*“Proses perencanaan pengelolaan dana desa diawali melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), yang selanjutnya dilanjutkan dengan penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) sebagai landasan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes).”*

Dalam forum Musrenbangdes, disepakati Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang kemudian dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes). Setelah RAPBDes selesai disusun, dokumen tersebut diajukan kepada kepala desa untuk mendapatkan persetujuan, lalu dilanjutkan ke tingkat kabupaten untuk dilakukan peninjauan. Saat ini, prioritas pembangunan di Desa Tanete Harapan difokuskan pada peningkatan infrastruktur jalan, pembangunan akses transportasi di wilayah permukiman dan area

persawahan, perbaikan gorong-gorong, serta pengembangan berbagai fasilitas umum lainnya.

**c. Tahap Pelaksanaa Dana Desa**

Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan untuk mendukung kewenangan luas yang dimiliki oleh desa. Agar pemanfaatannya lebih optimal, penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai kegiatan pembangunan serta program pemberdayaan masyarakat di tingkat desa.

Pada tahun 2025, total pendapatan Desa Tanete Harapan mencapai Rp1.256.875.000,00. Pendapatan tersebut berasal dari beberapa sumber, yaitu Dana Desa sebesar Rp817.410.000,00, Bagian Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp43.070.000,00, serta Alokasi Dana Desa sebesar Rp396.396.000,00. Dalam hal belanja, alokasi anggaran dibagi ke dalam beberapa bidang, antara lain:

- 1) Penyelenggaraan Pemerintahan sebesar Rp484.825.984,00,
- 2) Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp542.367.300,00,
- 3) Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp35.810.000,00,
- 4) Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp28.965.000,00, dan
- 5) Penanggulangan Bencana sebesar Rp64.800.000,00.

Berdasarkan data tersebut, prioritas utama kegiatan di Desa Tanete Harapan berada pada bidang pembangunan. Pelaksanaan kegiatan pembangunan ini dikoordinasikan oleh Kepala Seksi (Kasi) Pembangunan bersama staf pembangunan desa. Selain untuk meningkatkan infrastruktur dan pelayanan publik, kegiatan pembangunan ini juga menjadi sarana untuk memberdayakan masyarakat Desa Tanete Harapan, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone.

**Tabel 4.4 Laporan Realisasi Desa Tanete Harapan**

LAPORAN REALISASI APBDes DESA TANETE HARAPAN TAHUN ANGGARAN 2025			
URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH KURANG (Rp)
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan Transfer	1.256.875.000,00	88.983.000,00	1.167.892.000,00
Dana Desa	817.410.000,00	0,00	817.410.000,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	43.070.000,00	0,00	43.070.000,00
Alokasi Dana Desa	396.395.000,00	88.983.000,00	307.412.000,00
Pendapatan Lain-lain	1.324.380,00	46.177,00	1.278.203,00
Bunga Bank	1.324.380,00	46.177,00	1.278.203,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.258.199.380,00</b>	<b>89.029.177,00</b>	<b>1.169.170.203,00</b>

BELANJA			
Belanja Pegawai	349.128.000,00	987.525,00	348.140.475,00
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	62.400.000,00	109.725,00	62.290.275,00
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	238.860.000,00	877.800,00	237.982.200,00
Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.268.000,00	0,00	2.268.000,00
Tunjangan BPD	45.600.000,00	0,00	45.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa	431.464.284,00	58.640.200,00	372.824.084,00
Belanja Barang Perlengkapan	83.486.680,00	29.025.300,00	54.461.380,00
Belanja Jasa Honorarium	301.289.604,00	10.354.900,00	290.934.704,00
Belanja Perjalanan Dinas	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00
Belanja Operasional Perkantoran	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Belanja Pemeliharaan	3.928.000,00	1.500.000,00	2.428.000,00
Belanja Barang dan Jasa ke Masyarakat	17.760.000,00	17.760.000,00	0,00
Belanja Modal	311.376.000,00	0,00	311.376.000,00
Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	75.172.000,00	0,00	75.172.000,00
Gedung, Bangunan dan Taman	236.204.000,00	0,00	236.204.000,00
Belanja Tidak Terduga	64.800.000,00	0,00	64.800.000,00

<b>JUMLAH BELANJA</b>	1.156.768.284,00	59.627.725,00	1.097.140.559,00
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	101.431.096,00	29.401.452,00	72.029.644,00
<b>PEMBIAYAAN</b>			
Penerimaan Pembiayaan	62.050.904,00	62.050.904,00	0,00
SILPA Tahun Sebelumnya	62.050.904,00	62.050.904,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan	163.482.000,00	0,00	163.482.000,00
Penyertaan Modal Desa	163.482.000,00	0,00	163.482.000,00
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	62.050.904,00	(101.431.096,00)	(163.482.000,00)
<b>SISA LEBIH PEMBIAAAN ANGGARAN</b>	0,00	91.452.356,00	(91.452.356,00)

(Sumber: Data Desa Tanete Harapan)

#### a. Tahap Pelaporan Dana Desa

Setiap pelaksana kegiatan diwajibkan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan kepada sekretaris desa dalam bentuk laporan kegiatan. Setelah seluruh laporan diterima, sekretaris desa melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah desa. Setelah itu, sekretaris desa bertugas menyusun laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Laporan yang telah disusun tersebut kemudian diserahkan kepada kepala desa untuk mendapatkan persetujuan, sebelum dilanjutkan ke pihak kecamatan dan selanjutnya ke kabupaten guna proses tindak lanjut secara administratif.

Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan dokumen resmi yang menyajikan informasi secara menyeluruh mengenai pemanfaatan anggaran desa sepanjang satu tahun anggaran. Laporan ini berfungsi sebagai alat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Laporan tersebut mencakup penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, serta sumber pendapatan lain yang diterima desa selama periode pelaporan.

Laporan Realisasi APBDes wajib ditetapkan melalui Peraturan Desa, karena dalam proses penyusunannya, pemerintah desa harus menyertakan peraturan tersebut sebagai dasar hukum pelaksanaan APBDes, yang menjadi bentuk legalitas dan pertanggungjawaban yang sah. Setelah laporan selesai disusun dan disahkan, pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perwakilan masyarakat menggelar musyawarah. Dalam forum ini, dilakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah dijalankan selama satu tahun anggaran. Proses ini menunjukkan komitmen pemerintah desa dalam mewujudkan keterbukaan dan transparansi kepada masyarakat.

Selain itu, menjelang berakhirnya seluruh kegiatan tahunan, Pemerintah Desa Tanete Harapan turut berperan aktif dalam menyosialisasikan berbagai program yang akan dijalankan. Sosialisasi ini dilakukan dalam forum rapat RT, di mana sekretaris desa biasanya menjadi pihak yang memaparkan rencana kegiatan. Kepala desa pun turut

hadir dan berpartisipasi dalam setiap rapat RT sebagai bentuk pendekatan langsung antara pemerintah desa dan warganya. Sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi publik, laporan realisasi APBDes yang telah disepakati melalui musyawarah kemudian dicetak dalam bentuk banner dan dipasang di samping balai desa, sehingga dapat diakses dan diketahui oleh seluruh warga masyarakat.

**Tabel 4.5 Laporan APBDes Desa Tanete Harapan**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) PEMERINTAH DESA TANETE HARAPAN KECAMATAN CINA KABUPATEN BONE TAHUN ANGGARAN 2025			
URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/KURAN (Rp)
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan Transfer	1.256.875.000,00	88.983.000,00	1.167.892.000,00
Dana Desa	817.410.000,00	0,00	817.410.000,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	43.070.000,00	0,00	43.070.000,00
Alokasi Dana Desa	396.395.000,00	88.983.000,00	307.412.000,00
Pendapatan Lain-lain	1.324.380,00	6.177,00	1.278.203,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN BELANJA</b>	<b>1.258.199.380,00</b>	<b>89.029.177,00</b>	<b>1.169.170.203,00</b>
Bidang Penyelenggaraan	484.825.984,00	24.213.425,00	460.612.559,00
Bidang Pelaksanaan	542.367.300,00	6.704.300,00	535.663.000,00
Bidang Pembinaan	35.810.000,00	28.710.000,00	7.100.000,00
Bidang Pemberdayaan	28.965.000,00	0,00	28.965.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana	64.800.000,00	0,00	64.800.000,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.156.768.284,00</b>	<b>59.627.725,00</b>	<b>1.097.140.559,00</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>101.431.096,00</b>	<b>29.401.452,00</b>	<b>72.029.644,00</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>			
Penerimaan Pembiayaan	62.050.904,00	62.050.904,00	0,00



Pengeluaran Pembiayaan	163.482.000,00	0,00	163.482.000,00
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	(101.431.096,00)	62.050.904,00	(163.482.000,00)
<b>SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN</b>	0,00	91.452.356,00	(91.452.356,00)

(Sumber Data Desa Tanete Harapan)

## 2. Penerapan *Good Corporate Governance* dalam Pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa Tanete Harapan Kec. Cina, Kab. Bone

*Good corporate governance* di sektor publik dapat diartikan sebagai suatu mekanisme pengelolaan pemerintahan yang efektif dan transparan, yang melibatkan berbagai pihak terkait (pemangku kepentingan) dalam menjalankan aktivitas ekonomi, sosial, dan politik. Selain itu, tata kelola ini juga mencakup pengelolaan sumber daya yang beragam, seperti sumber daya alam, keuangan, dan sumber daya manusia, dengan tujuan utama untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Pelaksanaannya didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, pemerataan, kesetaraan, dan akuntabilitas. (Sedarmayanti, 2012)

### a. Penerapan Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa Tanete Harapan Kecamatan Cina Kabupaten Bone

Di Desa Tanete Harapan, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, musyawarah menjadi metode utama untuk mencapai keputusan bersama. Selain berperan sebagai sarana penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan secara kolektif, musyawarah juga mencerminkan pemerintah desa menunjukkan transparansinya dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program desa selama satu tahun. Mengingat desa ini terdiri dari tiga dusun, kepala desa bersama seluruh perangkat desa turut aktif berpartisipasi dalam musyawarah tersebut, sehingga komunikasi dan keterlibatan antara pemerintah desa dan masyarakat tetap terjalin dengan baik. Dalam forum musyawarah ini, pemerintah desa memaparkan berbagai program yang telah maupun yang akan dilaksanakan, sehingga masyarakat dapat terlibat langsung dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan desa.

Sementara itu, upaya untuk mewujudkan transparansi yang optimal bukanlah hal yang mudah dan memerlukan proses serta usaha yang berkelanjutan. Dalam mencapai transparansi, dibutuhkan adanya dukungan yang dapat dijadikan landasan dalam pengambilan keputusan, guna menyampaikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Dengan adanya komponen ini maka di dapatkan pertanyaan yang diberikan kepada responden.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada pihak pemerintah Desa Tanete Harapan, peneliti dapat menguraikan tentang bagaimana penerapan transparansi dalam kualitas keuangan desa di Desa Tanete Harapan yang akan dijabarkan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Irmasanti.S.Pd. selaku Sekertaris Desa Tanete Harapan mengatakan bahwa:

*“Penerapan transparansi dalam pengelolaan keuangan dana desa di Desa Tanete Harapan dalam tahap perencanaan semua berdasarkan musyawarah desa dengan melibatkan lembaga desa seperti BPD, toko adat, toko agama, dan dalam musyawarah desa ini membahas usulan-usulan atau aspirasi masyarakat melalui lembaga BPD dan LPMD. Setelah itu skala prioritas atas penggunaan dana desa sudah diatur dalam Permendagri dan Perwal setelah itu didasari musyawarah desa dan akan dikeluarkan Permendes. Setiap adanya rapat evaluasi kami melibatkan*

*lembaga desa seperti masyarakat karena semua kegiatan desa harus berdasarkan musyawarah desa. Pemerintah desa dalam memberikan informasi mengenai tanggungjawab terkait pelaksanaan pengelolaan dana desa membuat laporan secara terbuka melalui papan informasi atau baliho untuk masyarakat, baliho dan LPJ selalu dipajang.”*

Berdasarkan hasil wawancara Ibu Nurlia (Bendahara Kaur Keuangan Desa Tanete Harapan) mengenai Transparansi Kualitas Laporan Keuangan Desa mengatakan bahwa:

*“Di akhir tahun kami pemerintah desa memberikan informasi di tengah tengah masyarakat mengenai realisasi pelaksanaan penggunaan dana desa melibatkan BPD, toko adat, toko agama. Penerapan trasparansi memang harus di terapkan dengan melakukan pemasangan Benner APBDesa.”*

Salah satu bentuk transparansi pemerintah desa kepada masyarakat diwujudkan melalui pemasangan banner APBDesa yang dipasang di samping balai desa. Langkah ini merupakan upaya untuk membuka akses informasi terkait pengelolaan dana desa kepada seluruh warga. Pemasangan banner dilakukan setelah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) disetujui oleh pihak kabupaten.

Namun demikian, meskipun pemasangan banner telah dilakukan, lokasi penempatannya yang terbatas hanya di sekitar balai desa dinilai masih kurang efektif. Hal ini mengakibatkan tidak seluruh masyarakat memperoleh informasi tersebut secara langsung. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan diskusi lebih lanjut untuk memperluas titik pemasangan banner, khususnya di lokasi-lokasi strategis yang mudah dijangkau oleh masyarakat, agar prinsip transparansi dapat benar-benar terlaksana secara menyeluruh. Sementara itu, upaya untuk mewujudkan transparansi yang optimal bukanlah hal yang mudah dan memerlukan proses serta usaha yang berkelanjutan. Dalam mencapai transparansi, dibutuhkan adanya dukungan yang dapat dijadikan landasan dalam pengambilan keputusan, guna menyampaikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya

#### **b. Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa Tanete Harapan Kecamatan Cina Kabupaten Bone**

Penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa menjadi elemen penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG). Prinsip-prinsip utama GCG, seperti partisipasi, transparansi, dan pertanggungjawaban, harus dijalankan secara konsisten dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa. Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, akuntabilitas diwujudkan melalui praktik-praktik pemerintahan yang baik, yang menjamin bahwa penggunaan dana desa dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada pihak pemerintah desa Desa Tanete Harapan, peneliti dapat menguraikan tentang Penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dana desa di Desa Tanete Harapan yang akan dijabarkan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nurlia selaku Kaur Keuangan Desa Tanete Harapan mengenai penerapan Akuntabilitas mengatakan bahwa:

*“ Melalui musyawarah desa apa yang diminta oleh masyarakat yang kita prioritaskan, untuk akuntabilitasnya direalisasikan pasti di informasikan melalui papan informasi atau media sosial. Pelaksanaan pengelolaan dana desa sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Yang berhak melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa itu BPD, LPMD(Lembaga Pemerdayaan Masyarakat Desa),*

*kalau di kota itu inspektorat kota. Bentuk pengawasan yang dilakukan LPMD dalam proses pengelolaan dana desa itu melalui evaluasi, misalnya evaluasi fisik apakah sudah sesuai dengan dana yang diberikan kepada bangunan tersebut dan apakah sesuai dengan hasil musyawarah desa yang dilaksanakan desa, misalnya jenis laporan musyawarah desa seperti dokumentasi, daftar hadir dan notulen rapat. Laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa itu harus tutup buku di tanggal 30 Desember. Kesulitan yang dihadapi dalam pengelolaan dan pelaporan dana desa kesulitannya seperti dibagian fisik, sebenarnya itu bisa diatasi oleh kepala desa dan kalau kepala desa ingin mencari solusi akan ditanyakan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat”.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fausiah Bohari.S.Pd. (Kasi Pemerintah Desa Tanete Harapan) mengenai penerapan Akuntabilitas mengatakan bahwa:

*“Pemerintah Desa Tanete Harapan senantiasa mengedepankan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, yang diwujudkan melalui musyawarah desa tahunan. Proses pengelolaan dana desa telah mengikuti sistem dan prosedur yang berlaku, termasuk melalui tahapan penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ) desa. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala, terutama dalam pembangunan fisik, di mana sebagian masyarakat tidak menyetujui program yang direncanakan, sehingga pemerintah desa perlu memberikan penjelasan secara terbuka. Selain itu, tantangan juga muncul dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban, karena belum semua perangkat desa menguasai penggunaan komputer, sehingga penyusunan laporan belum berjalan secara optimal”.*

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Dana Desa di Desa Tanete Harapan masih belum berjalan secara optimal. Meskipun demikian, pemerintah desa menunjukkan komitmen untuk terus berupaya meningkatkan kualitas pelaporan kepada masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat menjadi pihak yang paling merasakan langsung dampak dari akuntabilitas pemerintah desa. Namun, mekanisme pertanggungjawaban yang ada masih mengandung sejumlah kekurangan yang perlu dibenahi guna mewujudkan sistem akuntabilitas yang lebih baik dan sesuai dengan harapan bersama.

### **c. Penerapan Prinsip Resposibilitas dalam Pengelolaan Dana Desa Tanete Harapan Kecamatan Cina Kabupaten Bone**

Responsibilitas merupakan indikator yang menggambarkan sejauh mana penyelenggaraan pemerintahan dilakukan sesuai dengan hukum, peraturan, dan prosedur yang telah ditetapkan.( Daniel Aditya Utama dan Radiana Setiyani, 2014). Dalam setiap organisasi, termasuk di dalamnya pemerintah desa, setiap individu dituntut untuk memiliki komitmen dalam menjalankan tanggung jawabnya secara optimal. Selain itu, pelaksanaan tanggung jawab tersebut harus dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki masing-masing individu, sehingga tugas yang dijalankan dapat berjalan secara efektif, tertib, dan sesuai aturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Irwanto (Kepala Desa Tanete Harapan) mengenai penerapan Resposibilitas mengatakan bahwa:

*“Penerapan responsibilitas atau pertanggung jawaban dalam aparatur Desa Tanete Harapan memiliki tanggung jawab dan wewenang yang sudah diterapkan dan dituliskan dengan jelas dalam tugas pokok dan fungsi mereka masing-masing. Diserahkan ke sekretaris desa bertanggungjawab secara administrasi seluruh kegiatan kantor, bendahara desa bertanggungjawab seluruh keuangan. Seluruh kegiatan*

*dikomandoi oleh bagian-bagian tertentu dan saya sebagai kepala desa selalu mengkoordinir kegiatan”.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aswar Hamid.S.Pd.selaku Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Tanete Harapan mengatakan bahwa:

*“Sangat bertanggung jawab dan hati-hati sekali dalam penggunaan dana desa ini karena kalau kami tidak hati-hati akan berurusan dengan hukum, kalau soal tanggungjawab seratus persen kami bertanggung jawab dengan masalah dana desa. Pemerintah menanggapi keluhan masyarakat setiap masyarakat itu tidak mungkin seratus persen sepemikiran sama kita karena istilahnya mereka diluar kita didalam dan mungkin mereka kurang paham masalah di dalam, walaupun begitu memang biasanya dicari titik tengah dari permasalahan yang terjadi di Desa Tanete Harapan dan pasti akan dimusyawarkan.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nurlia selaku Kaur Keuangan Desa Tanete Harapan mengatakan bahwa:

*“Kejelasan tanggung jawab dan wewenang pemerintah desa tentunya bertanggungjawab dan kejelasannya itu melalui LPJ desa. Pemerintah desa menanggapi keluhan masyarakat akan dibahas melalui musyawarah desa ataupun melalui LPMD(Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa), BPD dan sampai ke kepala desa atau perangkat desa”.*

#### **d. Penerapan Prinsip Independensi (Kemandirian) dalam Pengelolaan Dana Desa Tanete Harapan Kecamatan Cina Kabupaten Bone**

Independensi merupakan kondisi di mana pemerintahan dijalankan secara profesional, bebas dari benturan kepentingan serta pengaruh atau tekanan dari pihak luar yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan dan prinsip tata kelola yang baik. Di Desa Tanete Harapan, prinsip ini tercermin dalam kebiasaan pemerintah desa yang secara rutin menyediakan ruang forum bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai usulan guna mendorong kemajuan desa. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Tanete Harapan terutama terlihat pada tahap perencanaan. Seluruh proses, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban penggunaan dana, dilaksanakan secara transparan melalui musyawarah yang difasilitasi oleh pemerintah desa. Musyawarah ini melibatkan berbagai perwakilan masyarakat, seperti kepala dusun, tokoh masyarakat, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), guna memastikan bahwa setiap tahapan pengelolaan Dana Desa berjalan dengan partisipatif dan akuntabel. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat transparansi, tetapi juga meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap program pembangunan yang dijalankan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Irmasanti.S.Pd. selaku Sekertaris Desa Tanete Harapan mengatakan bahwa:

*“Dalam pelaksanaan musyawarah desa, semua usulan dari masyarakat dibahas secara terbuka dan mendalam. Proses ini bertujuan untuk mencapai mufakat bersama sebagai dasar pengambilan keputusan yang adil dan demokratis. Setelah mufakat tercapai, pengambilan keputusan resmi dilakukan oleh Kepala Desa sebagai pemimpin pemerintahan desa”.*

#### **e. Penerapan Pelaksanaan Prinsip Keadilan dan Kesetaraan dalam Pengelolaan Dana Desa Tanete Harapan Kecamatan Cina Kabupaten Bone**

Memberikan perlakuan yang adil dan setara terhadap masyarakat dalam pemenuhan hak-haknya sesuai dengan perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan wujud dari prinsip keadilan sosial yang esensial dalam pengelolaan dana desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Irwanto selaku Kepala Desa Tanete Harapan mengenai kesetaraan dan keadilan mengatakan bahwa:

*“Dalam tahap pengelolaan desa, khususnya pada tahap perencanaan, Desa Tanete Harapan menerapkan prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat yang tinggi. Siapapun warga desa diperbolehkan mengajukan usulan tanpa adanya batasan, karena pemerintah desa selalu terbuka dan menerima setiap masukan dari masyarakat. Semua usulan yang berkaitan dengan program pembangunan desa ditampung tanpa terkecuali, sehingga mencerminkan komitmen pemerintah desa untuk mengakomodasi aspirasi seluruh elemen masyarakat. Selain itu, semua pihak masyarakat dilibatkan secara aktif dalam proses pengelolaan dana desa, baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan”.*

### **3. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa Tanete Harapan Kecamatan Cina Kabupaten Bone**

Kualitas Laporan Keuangan Desa Tanete Harapan merujuk pada sejauh mana laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah desa tersebut memenuhi prinsip-prinsip akuntansi yang baik, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Permendagri No.20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Salah satu indikator utama keberhasilan pengelolaan keuangan yang disusun dan disampaikan kepada pemangku kepetingan.

Adapun beberapa pertanyaan kepada pemerintah desa tanete harapan mengenai empat aspek kualitas laporan keuangan desa sebagai berikut:

#### **a. Aspek Relevansi**

Relevansi laporan keuangan harus menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan, baik oleh pemerintah Desa Tanete Harapan, maupun pihak pengawas eksternal. Di Desa Tanete Harapan laporan ini mencakup realisasi APBDes, rincian belanja dan penggunaan dana desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Irmasanti.S.Pd. selaku Sekertaris Desa Tanete Harapan mengenai kualitas laporan keuangan Desa Tanete Harapan yang relevansi mengatakan bahwa:

*“Mengenai Kualitas Laporan Keuangan kalau kita bicara Relevansi, menurut saya laporan keuangan desa sudah cukup memenuhi kebutuhan informasi masyarakat. Setiap kegiatan dan penggunaan anggaran tercantum jelas, terutama untuk belanja pembangunan, bantuan social dan kegiatan pemerdayaan. Jadi kalau warga mau tahu berapa anggaran untuk jalan tani itu semua ada di laporan”.*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan desa telah disusun dengan memperhatikan Aspek Relevansi. Namun, meskipun laporan keuangan sudah relevan beberapa tantangan masih muncul dalam hal kecepatan penyampaian informasi dan pembaharuan data secara berkala. Meskipun begitu secara keseluruhan, laporan keuangan Desa Tanete Harapan telah memenuhi prinsip relevansi sebagai salah satu karakteristik laporan yang berkualitas.

#### **b. Aspek Keandalan**

Keandalan menunjukkan bahwa informasi dalam laporan keuangan bebas dari kesalahan material dan dapat dipertanggungjawabkan. Laporan yang andal harus berdasarkan data yang dapat diverifikasi, jujur dalam penyajian, dan memiliki dokumentasi pendukung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nulia selaku Kaur Keuangan Desa Tanete Harapan mengenai Keandalan dalam laporan keuangan Desa Tanete Harapan bahwa:

*“Cara kami memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun dapat dipercaya yaitu kami selalu mencatat transaksi berdasarkan bukti yang sah. Setiap belanja harus ada Kwitansi dan laporan kegiatan. Setelah itu kami input ke Aplikasi SISKEUDES. Kalau nanti ada pemeriksaan, semua data dan dokumen siap ditunjukkan agar laporan kami biasa dipercaya”.*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan desa telah memenuhi unsur keandalan. Hal ini ditunjukkan melalui proses pencatatan dan pelaporan yang berbasis bukti transaksi yang sah, seperti kwitansi, nota, dan dokumen pengadaan. Semua transaksi keuangan di dokumentasikan secara sistematis dan dicatat menggunakan Aplikasi SISKEUDES yang membantu menjaga akurasi dan konsistensi data.

c. Aspek Dapat Dipahami

Kualitas laporan keuangan yang baik harus juga dapat dipahami oleh pengguna, khususnya oleh masyarakat agar informasi yang disajikan dapat diakses dan dimengerti oleh berbagai kalangan, termasuk masyarakat Desa Tanete Harapan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Cemu (BPD Desa Tanete Harapan) mengenai Keterpahaman dalam laporan keuangan Desa Tanete Harapan bahwa:

*“Laporan keuangan desa yang dibuat cukup baik. Mereka menyusun laporan keuangan laporan dengan format yang sesuai aturan dan biasanya disertai penjelasan singkat dalam forum musyawarah desa”*

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa aspek Dapat dipahami dalam laporan keuangan Pemerintah Desa Tanete Harapan sudah mulai diterapkan dengan baik pemerintah desa telah berupaya menyajikan laporan dalam bentuk yang lebih sederhana dan informative agar mudah dipahami oleh masyarakat luas.

d. Aspek Dapat dibandingkan

Aspek dapat dibandingkan dalam laporan keuangan berperan penting untuk menilai kinerja dan konsistensi pengelolaan keuangan dari waktu ke waktu. Laporan keuangan desa dianalisis setiap tahun untuk melihat tren penggunaan anggaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nurlia (Kaur Keuangan Desa Tanete Harapan) mengenai bagaimana penerapan aspek dapat dibandingkan dalam laporan keuangan Desa Tanete Harapan mengatakan bahwa:

*“Kami menyusun laporan keuangan dengan format yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat melalui Aplikasi Siskeudes. Format ini konsisten digunakan dari tahun ke tahun sehingga dapat dibandingkan dengan laporan tahun sebelumnya. Misalnya, kami bisa lihat apakah belanja pembangunan tahun ini meningkat atau menurun dibandingkan tahun lalu”.*

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan telah memenuhi Aspek Dapat dibandingkan. Hal ini tercermin dari pengguna format laporan yang konsisten setiap tahun dan berpedoman pada sistem pelaporan yang seragam secara nasional melalui Aplikasi Siskeudes.

**Analisis Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa Tanete Harapan, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone.**

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat desa, observasi lapangan, dan studi dokumen laporan keuangan, diketahui bahwa Pemerintah Desa Tanete Harapan telah menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara bertahap namun signifikan dalam kegiatan pengelolaan keuangan desa. Prinsip-prinsip GCG yang dianalisis mencakup:

### 1. Transparansi

Pemerintah desa menunjukkan komitmen terhadap keterbukaan informasi anggaran melalui papan pengumuman desa, laporan pertanggungjawaban publik, dan musyawarah desa. Masyarakat bisa mengetahui rincian belanja dan program yang telah dilaksanakan, walaupun pemahaman teknis masyarakat masih perlu ditingkatkan.

### 2. Akuntabilitas

Setiap kegiatan yang menggunakan dana desa memiliki laporan pertanggungjawaban, didukung oleh dokumen sah dan tercatat dalam aplikasi Siskeudes. Pengauditan berkala dari Inspektorat Kabupaten juga memastikan pengelolaan anggaran berjalan sesuai aturan. Struktur pelaporan yang tertata rapi menunjukkan bahwa aparat desa memahami pentingnya akuntabilitas public.

### 3. Independensi

Dalam praktiknya, pemerintah desa menyusun anggaran secara mandiri berdasarkan musyawarah dan tidak tunduk pada intervensi pihak luar. Mekanisme partisipatif dalam penyusunan RKPDes menjadi cerminan independensi yang sehat

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Pemerintah Desa Tanete Harapan, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan di desa tersebut telah berlangsung dengan cukup baik. Pengelolaan keuangan desa telah mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku, mencerminkan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Dampak positif dari hal ini tercermin pada meningkatnya kualitas laporan keuangan yang disusun, sehingga laporan tersebut menjadi andal dan layak dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan yang tepat untuk pembangunan desa. Seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban, telah dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan desa.

Penerapan *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan telah mulai dilaksanakan dan memberikan pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Transparansi diterapkan melalui penyampaian informasi kepada masyarakat, meskipun perlu ditingkatkan agar lebih terbuka dan mudah diakses. Akuntabilitas terlihat dalam pelaporan pertanggungjawaban keuangan secara berkala. Resposibilitas dijalankan oleh aparat desa melalui komitmen menyusun laporan keuangan sesuai standar. Independensi masih perlu diperkuat, karena dalam beberapa kasus terdapat pengaruh dalam proses pengambilan keputusan keuangan. Keadilan (*fainerss*) mulai terlihat dalam upaya pemerintah desa mendistribusikan anggaran secara merata untuk kepentingan masyarakat.

## Referensi

- Armereo. "Analisis Good Corporate Governance Pada Pengelolaan Keuangan di Kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang", *Jurnal Ekombis Review*, Palembang 202.
- Arif Lukman, "Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Di Pemerintahan Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis", *Jurusan Akuntansi*, Universitas Islam, Riau. juli 2019.
- Aswar Hamid,S.Pd. Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Tanete Harapan, "Wawancara" oleh penulis di Desa Tanete Harapan, 29 April 2025.
- Cemu, Ketua Permusyawaratan Desa Tanate Harapan,"Wawancara" oleh penulis di Tanete Harapan, 29 April 2025

- Fausiah Bohari,S.Pd., Kasi Pemerintah Desa Tanete Harapan,"Wawancara" oleh peneliti di Desa Tanete Harapan,29 April 2025.
- Irwanto, Kepala Desa Tanete Harapan, "Wawancara" oleh Penulis di Desa Tanete Harapan, 29 April 2025.
- Irmasanti,S.Pd. Sekertaris Desa Tanete Harapan, "Wawancara" oleh penulis di Desa Tanete Harapan,29 April 2025
- Khairul Amri, "Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Pulau Harapan Kabupaten Sinjai", Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021.
- Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 2016.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/tanggal> 5 Maret 2024.
- Linda Lomi, GaChrista Yunnita Garung, "Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pencapaian Good Governance pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka pada tahun 2020", *Jurnal Akuntansi: Transpransi dan Akuntabilitas*, Malaka, 2020.